

Analisis Sakti Dalam Pelaporan Bendahara Pengeluaran Di BBPPKS Regional III Yogyakarta

Beccdivanto Trianjas Hutomo Aji

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi

19312140@students.uii.ac.id

Reni Yendrawati

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi

reni@uui.ac.id

Alamat : Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY

Abstract.

Society demands public sector organizations to be able to manage public services and provide them in an accountable, participative and transparent manner. SAKTI or Institutional Level Financial Application System is an application that is used as a means of work units in supporting the implementation of SPAN to carry out financial management which includes the planning stages to budget accountability. The purpose of this research is to observe how SAKTI works and to analyze the system, with the implications of whether it provides convenience in the performance of work units of government agencies. This type of research is descriptive qualitative and the method for collecting data used is direct observation with field research and library research, and the information will be filtered through descriptive analysis methods. The research results that have been achieved are that SAKTI is a new effectiveness. The advantage of using SAKTI is that it has an open platform, so it can be accessed anywhere and anytime, and provides efficient integration. Weaknesses in the use of SAKTI is the user's understanding in technical operations, so it requires sufficient training and another deficiency is the internal control of the organization. The conclusion of this research is that in the era of technology that pressures society for optimal and in-depth digital understanding. Suggestions by the author are to integrate a digital concept in the work system of the work unit, more understanding is needed so that it does not become an obstacle.

Keyword : *Technology, Digitalization, Accounting Information Systems, SAKTI, Public Sector.*

Abstrak.

Masyarakat menuntut organisasi sektor publik agar dapat mengelola pelayanan publik dan memberikan secara akuntabel, partisipatif, dan transparan. SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengobservasi bagaimana SAKTI bekerja dan menganalisis sistemnya, dengan implikasi apakah memberikan kemudahan dalam kinerja satuan kerja instansi pemerintah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan metode untuk pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dan informasi tersebut akan disaring melalui metode analisis deskriptif. Hasil

penelitian yang telah dicapai adalah SAKTI merupakan keefektivitasan yang baru. Kelebihan penggunaan SAKTI adalah mempunyai platform terbuka, sehingga bisa diakses dimana saja, dan kapan saja, dan memberikan integrasi yang efisien. Kekurangan dalam penggunaan SAKTI adalah pemahaman pengguna dalam mengoperasikan teknis nya, sehingga membutuhkan pelatihan yang cukup dan kekurangan lainnya adalah kendali internal organisasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam era teknologi yang menekan masyarakatnya untuk pemahaman digital yang optimal dan mendalam. Saran oleh penulis adalah untuk menginterasikan sebuah konsep digital dalam sistem kerja satker dibutuhkan pemahaman yang lebih agar tidak menjadi kendala.

Kata kunci: Teknologi, Digitalisasi, Sistem Informasi Akuntansi, SAKTI, Sektor Publik.

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah adalah sebuah lembaga yang dimiliki pemerintah untuk memenuhi pelayanan dan kesejahteraan rakyat (Risanti, 2022). Tentunya, lembaga pemerintah atau sektor publik harus mempunyai anggaran untuk menjalani kinerjanya dan melakukan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat. Sebagai masyarakat, salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan laba atau nirlaba adalah melalui laporan keuangan.

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan oleh lembaga sektor publik sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan yang signifikan adalah cara organisasi memperoleh sumber daya, organisasi nirlaba bergantung pada penyumbang dan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas operasinya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, mempunyai implikasi kepada informasi yang reliabel dan berkualitas. Masyarakat menuntut organisasi sektor publik agar dapat mengelola pelayanan publik dan memberikan secara akuntabel, partisipatif, dan transparan. PSAK nomor 45 menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan merepresentasikannya secara tepat untuk memenuhi kepentingan para anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010, disebutkan bahwa untuk memenuhi standar kualitas dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan organisasi nirlaba tersebut setidaknya harus memiliki karakteristik : a.) relevan, b.) andal, c.) dapat dibandingkan, dan d.) dapat dipahami.

SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh I Putu Yuditira Putra (2022) dengan judul “Implementasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi”. penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi SAKTI tersebut untuk melaporkan realisasi kinerja perusahaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah observasi langsung dan analisis yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah hasil pembukuan yang dilakukan oleh bendahara menjadi tidak efisien karena menggunakan banyak aplikasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI memberikan kemudahan dalam pelaporan keuangan dalam BBPPKS Regional III Yogyakarta dan kendalanya serta meneliti apakah ada metode teknis alternatif jika menghadapi kendala dalam penggunaannya. Harapan dari penulis dalam penelitian ini adalah dapat berkontribusi dalam menambah khazanah bagi seluruh sivitas akademik, khususnya Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, selain itu penulisan ini dapat menjadi kontribusi untuk pemerintah agar menjadi bahan evaluasi hasil kinerja pemerintah berdasarkan analisis hasil penelitian ini, terutama bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN LITERATUR

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010)

Menurut Mardiasmo (2018) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan (Mardiasmo, 2018). Standar akuntansi pemerintahan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa penyusunan laporan

keuangan pemerintah berbasis akrual. Dikutip dari Mardiasmo (2018) Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif.

2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Dariana, Oktavia J., 2018): **Relevan**, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. **Andal**, Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. **Dapat dibandingkan**, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. **Dapat dipahami**, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

3. Pengawasan

Pengawasan dalam laporan keuangan adalah sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Inspektorat, 2022). Tujuan pengawasan dalam laporan keuangan adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan meningkatkan pengendalian internal. Penerapan pengawasan internal diharapkan untuk mengendalikan resiko, meningkatkan kualitas keuangan, menjaga kelancaran komunikasi antar personel. Pengawasan diperlukan agar kinerja yang dianggarkan atau direncanakan telah berjalan dengan baik.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi

Romney dan Steinbard (2017) menjelaskan teknologi informasi (berupa perangkat keras dan perangkat lunak komputer) digunakan sebagai alat yang membantu sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi. Menurut pendapat para ahli diatas maka teknologi informasi akuntansi adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi dan keputusan.

5. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi instansi dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran (Kemenkeu, 2019). SAKTI merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Kemenkeu agar memudahkan para instansi satuan kerja dengan sistem input pelaporan secara digital yang bisa diakses oleh unit – unit satuan kerja. SAKTI mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

METODA PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan utama untuk mendeskripsikan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu fenomena alam atau fenomena akuntansi tanpa fokus mengaitkan fenomena tersebut dengan fenomena lain secara sistematis. Sumber data penelitian dan teknis pengumpulannya dibagi menjadi dua yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan survey lapangan, diamati, dan dicatat oleh peneliti, dan data sekunder yang merupakan penelitian dokumen – dokumen dan kepustakaan yang diperoleh dari buku – buku teks, tulisan ilmiah dan literatur sebagai acuan dalam penelitian ini. Teknis analisis untuk mengolah data tersebut adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

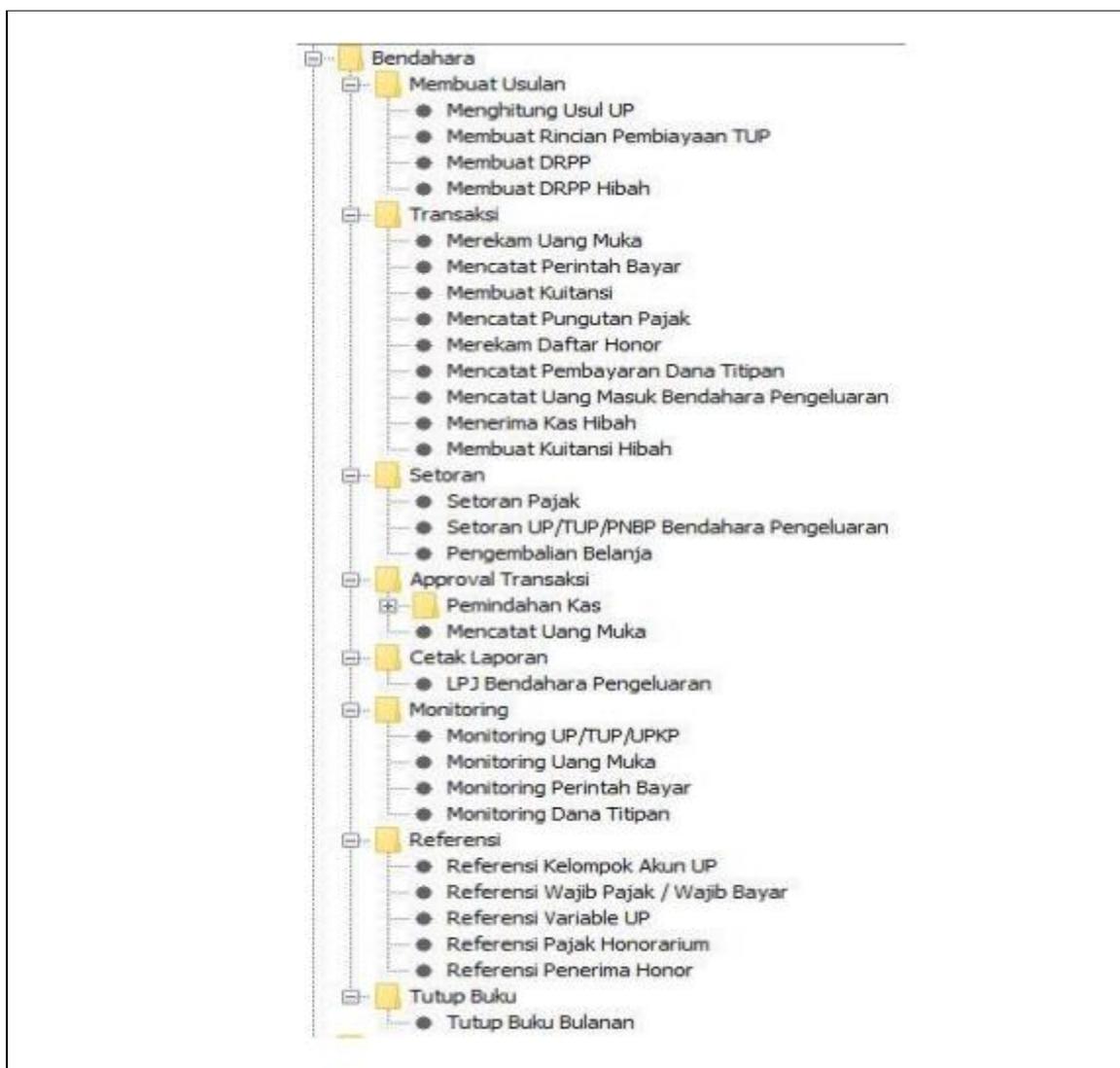
HASIL DAN DISKUSI

1) Pelaksanaan Perekaman dan Pencatatan Transaksi Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan fungsi bendahara pengeluaran secara umum yang telah diatur pada Peraturan Kementerian Keuangan No. 190/PMK.05/2012, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang dipilih untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mempertanggungjawabkan, dan menatausahakan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Dalam aplikasi SAKTI Bendahara pengeluaran mempunyai otoritas untuk mempertanggungjawabkan anggaran pelaksanaan satker. Dalam aplikasi tersebut Bendahara Pengeluaran bisa memilih untuk membuat usulan, mencatat dan merekam transaksi, mengatur setoran pajak, mempersetujui transaksi, cetak laporan, monitoring, mencari referensi, dan menutup buku.

berikut adalah susunan menu Bendahara Pengeluaran dalam aplikasi SAKTI:



2) Pencatatan LPJ untuk Bendahara Pengeluaran

Langkah – langkah pembuatan LPJ untuk Bendahara Pengeluaran :

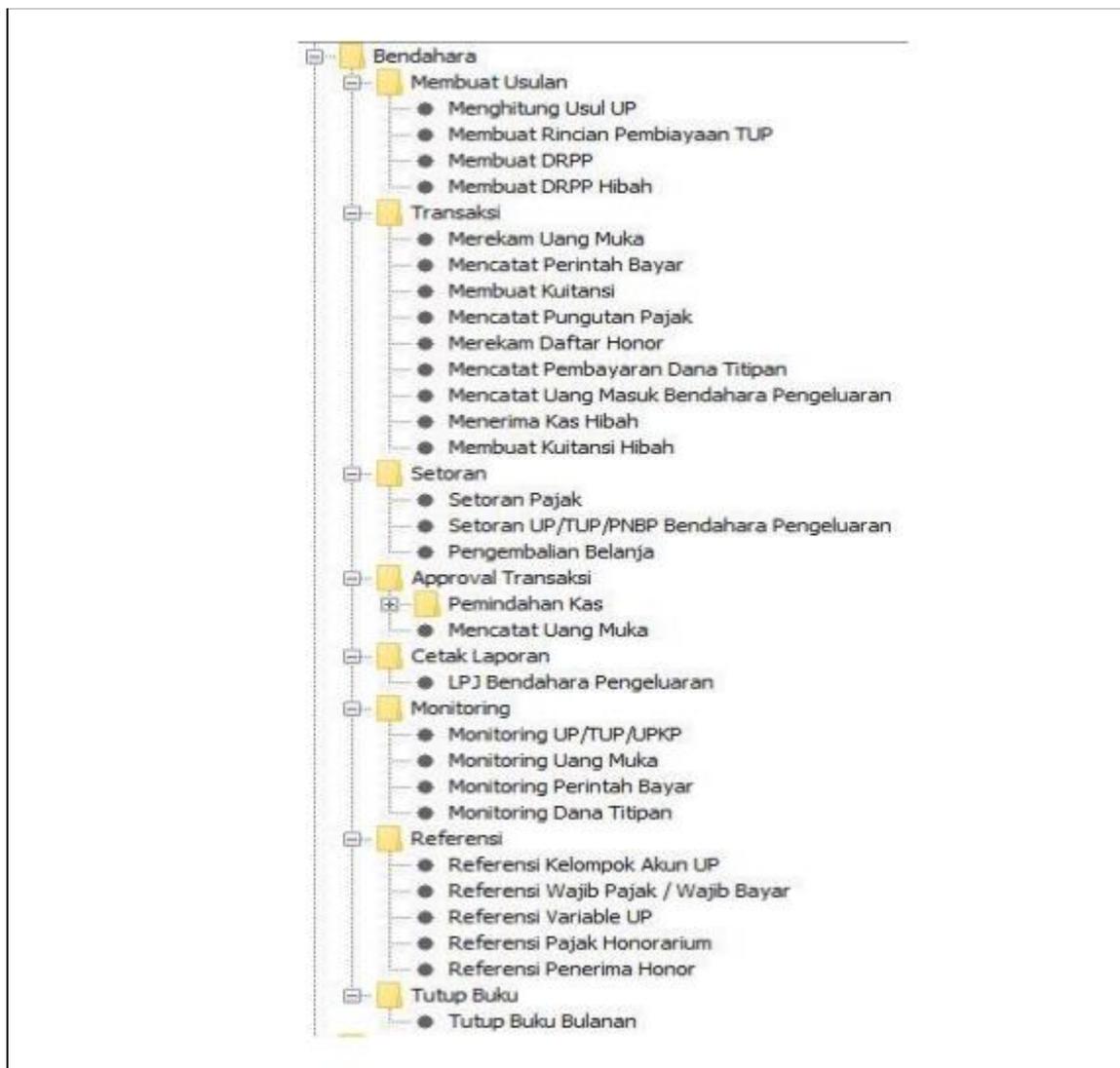
1. Login dengan user SAKTI



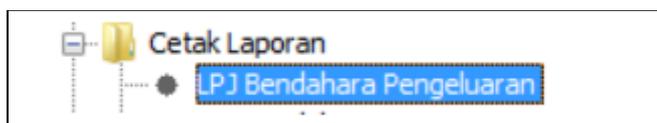
2. Setelah masuk aplikasi



3. Pilih menu Bendahara



4. Pilih Cetak Laporan



5. Isi Form pembuatan LPJ Bendahara sesuai keterangan

Jenis Laporan : -- Pilih Jenis Laporan --
Periode : 2013-06
No. DIPA : -- Pilih No. DIPA --
Program : -- Pilih Program --
Kegiatan : -- Pilih Kegiatan --
Fungsi : -
Sub Fungsi : -
Informasi Kas Fisik
Kas Tunai : 0,00
Kas Bank : 0,00
Hasil Pemeriksaan Kas
Penjelasan Selisih Kas :
Penjelasan Selisih Pembukuan LP :
Cetak 1 Keluar

Keterangan form :

- Jenis Laporan : Jenis Laporan yang akan dicetak
 - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - Hasil Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - Buku Bank
 - Buku Kas Tunai
 - Buku Pembantu UP
 - Buku Pembantu TUP
 - Buku Pembantu Pajak
 - Buku Utang Perwakilan Pihak Ketiga
 - Buku Pembantu BPP
 - Buku Pembantu Uang Muka
 - Buku Pembantu Lain – lain
 - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Periode : Periode bulan LPJ
- No DIPA, Program Kegiatan, Fungsi, Sub Fungsi : data COA untuk satker login.
- Kas Tunai : kas tunai fisik yang ada di bendahara pengeluaran pembantu
- Kas Bank : kas tunai bank yang ada di Bendahara pengeluaran pembantu
- Penjelasan selisih kas : Penjelasan mengenai selisih kas fisik dan kas pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3) Kemudahan dan Kendala

Pelaksanaan praktek magang menggunakan SAKTI menggambarkan sebuah efektivitas yang baru. Efektivitas ini dikarenakan SAKTI merupakan aplikasi yang mengintegrasikan seluruh dokumen *input* seperti tanggung jawab anggaran satuan kerja dalam satu aplikasi. SAKTI dalam penggunaannya memberikan informasi yang relevan bagi divisi – divisi yang bertanggung jawab. SAKTI memberikan beberapa kemudahan yaitu:

a) Platform terbuka

SAKTI adalah aplikasi yang dapat dibuka dengan macam – macam perangkat karena fitur platform terbukanya yang bisa diakses dengan website. Namun untuk menggunakannya, hanya dapat diberikan kepada beberapa pegawai.

b) Integrasi Efisien

Dalam fungsionalitas, SAKTI memberikan akses koneksi antar satuan kerja dengan satuan kerja lainnya. Hal ini memudahkan satker untuk distribusi informasi satu sama lain dengan kendala yang minimal. Selain itu SAKTI tidak memerlukan *update* tertentu yang dapat menghambat proses pencatatan satker.

Beberapa hal yang di perlu dibahas dalam penelitian ini adalah kendala yang telah diobservasi oleh peneliti, yaitu :

a) Pemahaman Aplikasi secara optimal

Penggunaan sakti memberikan banyak akses dan banyak kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya. Salah satunya adalah pemahaman yang kurang optimal dengan aplikasi tersebut. kurangnya pemahaman ini adalah sebuah penghambatan bagi pegawai – pegawai dalam penggunaan aplikasi tersebut.

b) Kendali internal organisasi

SAKTI memberikan pengamanan akses user dengan *One – time Password* atau OTP. ini merupakan keunggulan yang ada dalam sakti namun mempunyai potensi masalah yang bisa dihadapi oleh internal satker. Jika pengguna satker ingin mengakses aplikasi maka dibutuhkan OTP yang harus diterima oleh pengguna, permasalahannya adalah jika staff atau pejabat yang menggunakan aplikasi tersebut mempunyai kegiatan yang lebih penting atau tidak hadir, maka proses tersebut akan terhambat dan akan memakan waktu yang berharga.

- OTP atau *One – Time Password* hanya akan dikirim satu kali dan bisa berpotensi tidak terkirim dan harus dilakukan berulang kali hanya dalam mengakses aplikasi tersebut.

Dalam Penelitian ini, diketahui bahwa tidak ada metode teknis alternatif selain menjalankan birokrasi tanpa aplikasi secara manual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah mencapai kesimpulan bahwa dalam era teknologi yang menekan masyarakatnya untuk pemahaman digital yang optimal dan mendalam. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi memberikan kemudahan dengan fasilitas *open platform*-nya, dengan ini SAKTI bisa diakses oleh para pengguna dimana saja dan kapan saja. Selain *Open Platform*, SAKTI memberikan integrasi data yang efisien, yang membedakannya adalah proses dalam *input* data laporan tanggung jawab instansi. Namun dalam segala kemudahannya, SAKTI juga memberikan beberapa kendala dalam penggunaannya, kendala yang dihadapi adalah kendala yang sering muncul dalam penggunaan aplikasi sistem *Open Platform*, yaitu, kendala sinyal lokasi dan lingkungan yang tidak mendukung, dan kurangnya pemahaman dengan sistem yang digunakan seperti website pada biasanya. Selain itu, SAKTI juga menggunakan OTP atau *One – Time Password* yang dalam hal ini bisa memberikan potensi kendala dalam mengakses aplikasi tersebut. Dalam tingkat penggunaan aplikasi untuk pencatatan dan perekaman, aplikasi SAKTI memberikan kemudahan dalam tingkat yang berbeda, sehingga harus ada pemahaman yang bertambah dalam penggunaannya. Saran penulis adalah untuk menginterasikan sebuah konsep digital dalam sistem kerja satker dibutuhkan pemahaman yang lebih agar tidak menjadi kendala. saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan tingkat indikator unruk menyesuaikan dan mengevaluasi sistem kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan tingkat indikator unruk menyesuaikan dan mengevaluasi sistem kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Serta, membandingkan pengalaman kinerja pengguna dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan para pihak yang sudah membantu dalam pembuatan penulisan artikel ini.

REFERENSI

S. Risanti, "Apa itu Instansi," Fortune Media, 5 November 2022. [Online]. Available: <https://www.fortuneidn.com/news/surti/apa-itu-instansi>. [Accessed 11 Februari 2023].

P. R. Andarsari, "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba," *Jurnal Ekonomi*, pp. 143-152, 2016.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2018.

Dariana & Jonase Oktavia, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bengkalis)," *Jurnal Akuntansi Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 77-105, 2018.

Inspektorat, "Tujuan dan sasaran," 2022. [Online]. Available: <https://inspektorat.kaltimprov.go.id/statis/halaman/tujuan-dan-sasaran>.

Marshall B. Romney & Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2017.

T. Sutabri, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: ANDI, 2014.

D. Kemenkeu, "SAKTI," 2019. [Online].

Putra, "Salamadian," Purwakarta Digital Network , 24 Juli 2022. [Online]. Available: <https://salamadian.com/pengertian-data/>. [Accessed 11 Februari 2023].